



**Revisi  
Laporan Akuntabilitas  
Kinerja Instansi  
Pemerintah (LAKIP)  
Tahun 2020**

**Dinas Komunikasi dan Informatika**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2020.

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).


Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggung jawaban keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja sehingga diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dalam memenuhi aspirasi masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2020 merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, dan realisasi pencapaian indikator kinerja serta sasaran dengan target yang telah ditetapkan, sebagai bentuk pertanggung jawaban dan menginformasikan gambaran kinerja yang telah dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi sepanjang Tahun Anggaran 2020 dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2020.

Semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai tolak ukur dalam menyusun strategi kebijaksanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dimasa yang akan datang untuk lebih meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan pelaksanaan e-Government di Kota Bogor..

Bogor, Juli 2021

	Ditandatangani secara elektronik oleh: <b>Kepala,</b> <b><u>Rahmat Hidayat, S.Sos, MM</u></b> Pembina Utama Muda
---	---

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. GAMBARAN UMUM.....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA SUSUNAN ORGANISASI .....	1
C. DASAR HUKUM.....	4
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>7</b>
A. PERENCANAAN KINERJA.....	7
B. PERJANJIAN KINERJA .....	11
C. MATRIKS PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR TAHUN 2021 .....	11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>15</b>
A. CAPAIAN KINERJA .....	15
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	18
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>24</b>

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. GAMBARAN UMUM**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor merupakan salah satu dinas yang mengampu 3 (tiga) urusan wajib non pelayanan dasar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, yang mempunyai peran strategis dalam mewujudkan Visi Kota Bogor yaitu Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga, sehingga keberadaannya perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan seiring dengan tuntutan jaman dan kemajuan teknologi. Keberadaan Dinas Komunikasi dan Informatika ditujukan untuk percepatan penyampaian informasi dan mendukung pelayanan publik melalui pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sesuai dengan Misi Kedua Pemerintah Kota Bogor yaitu Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sebagai salah satu dinas yang menangani urusan wajib bukan pelayanan dasar dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang mempunyai peran strategis sebagai leading sektor dalam implementasi smart city berusaha mewujudkan komitmen, peran dan pengabdian dalam mendorong percepatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi tata kelola pemerintah daerah serta memberi layanan prima kepada masyarakat dan menjadikan Kota Bogor sebagai smart city sebagai upaya peningkatan layanan terhadap masyarakat.

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA SUSUNAN ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 56 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Bogor termasuk kedalam Dinas Tipe A yang terdiri dari:

**a. Kepala Dinas;**

**b. Sekretariat, membawahkan:**

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

**c. Bidang Statistik Sektoral membawahkan:**

1. Seksi Metadata Statistik Sektoral;
2. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Statistik Sektoral;
3. Seksi Infrastruktur Statistik Sektoral;

**d. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan;**

1. Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi;
2. Seksi Komunikasi Publik;
3. Seksi Kemitraan Media Komunikasi;

**e. Bidang Jaringan, Domain dan Persandian membawahkan:**

1. Seksi Tata Kelola Domain;
2. Seksi Infrastruktur Jaringan;
3. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;

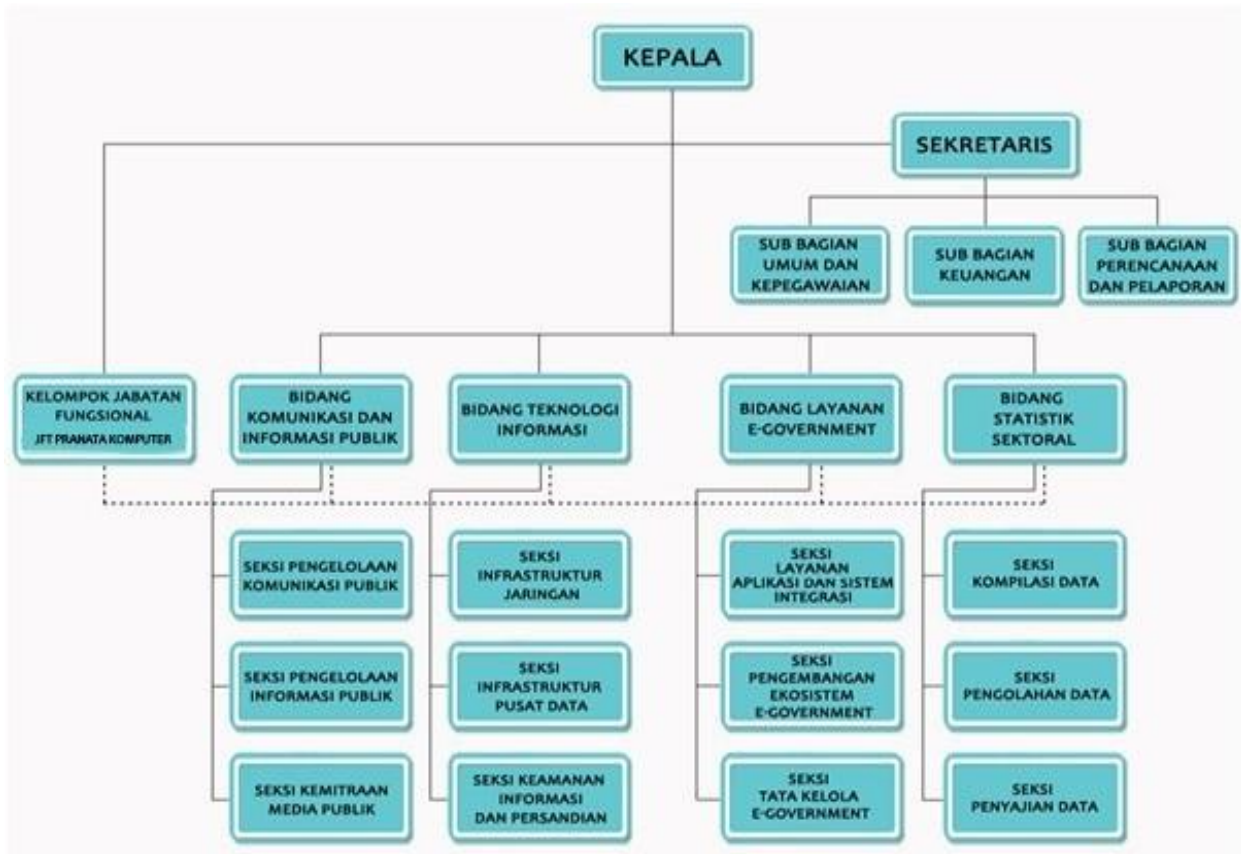
**f. Bidang e-Government, membawahkan:**

1. Seksi Tata Kelola e-Government;
2. Seksi Pusat Data;
3. Seksi Layanan Aplikasi

**g. Kelompok Jabatan Fungsional.**

## Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 108 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor)



Sumber : Diskominfo Tahun 2021

### Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 108 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

#### a. Tugas

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

## **b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas dibidang pengelolaan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 5) pelaksanaan teknis operasional dibidang pengelolaan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 6) pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Dasar Hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor mengacu kepada :
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Informatika dan Komunikasi;
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan e-Government;

17. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 108 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor didasarkan atas visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas yang telah dicantumkan pada dokumen Rencana Strategis 2019-2024. Dokumen Renstra tersebut telah disusun dengan mengakomodir kondisi dan kebutuhan dalam pencapaian tata kelola *e-Government* dan *Smart City* untuk mewujudkan misi kedua Kota Bogor.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mendukung terlaksananya misi kedua pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019–2024, yaitu “Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas”. Untuk mewujudkan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019–2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian.

#### **A.1. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bogor sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui

tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun Tujuan dan Sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

**Tujuan 1** : Peningkatan kualitas smart government

**Sasaran 1** : a. Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep *Good Governance*  
b. Tersedianya data statistik sektoral

**Tujuan 2** : Peningkatan Manajemen Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional

**Sasaran 2** : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas

## A.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, diperlukan langkah-langkah strategi dan kebijakan. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan yang dirumuskan sebagai berikut :

***Tabel Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor***

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep	Meningkatkan tata kelola kelembagaan.	Meningkatkan peran Dinas Kominfo sebagai Government Chief Information Officer (GCIO) Kota Bogor.
		Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM TIK.

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Good Governance	Meningkatkan kapasitas infrastruktur TIK.	Peningkatan prasarana dan sarana data center sesuai standar.
		Penyediaan jaringan fiber optik di perangkat daerah.
		Penetapan regulasi pengelolaan server.
		Memenuhi Kebutuhan Server Back Up Data dan DRC.
		Penyediaan dan Pemeliharaan CCTV.
		Melaksanakan penataan dan pemeliharaan CCTV se-Kota Bogor.
		Melaksanakan Layanan Telekonferensi Pemerintah.
	Meningkatkan Layanan Interoperabilitas.	Menyelenggarakan Layanan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi bagi Seluruh Perangkat Daerah dengan menetapkan standar format data dan aplikasi.
		Menyelenggarakan Layanan Application Programm Interface (API) daerah.
		Melaksanakan layanan Repository/ Data warehouse.
Penetapan Regulasi tentang Hak Akses, Pengelolaan Data Base dan Data warehouse.		

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Meningkatkan jumlah sistem informasi yang diintegrasikan.
	Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Penyebarluasan informasi pemerintah daerah kepada masyarakat berbasis elektronik dan media cetak.
	Menyediakan sarana dan prasarana keamanan informasi	Merumuskan regulasi yang mengatur tentang keamanan informasi.
	Mengatasi kesenjangan waktu pelayanan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik	Integrasi layanan pengaduan non kedaruratan (call center) dengan layanan kedaruratan (NTPD) yang beroperasi selama 24 jam setiap hari.
Tersedianya data statistik sektoral	Meningkatkan kerjasama pengelolaan satu data statistik sektoral yang berkualitas melalui komunikasi dan pertukaran data	Menjadikan Diskominfo sebagai satu-satunya sumber data dan informasi statistik sektoral.
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas	Menciptakan tata kelola profesional dengan tertib administrasi dan pemenuhan kebutuhan dasar administrasi perkantoran	Meningkatkan operasional administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

Sumber : Diskominfo Tahun 2020

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor merupakan dokumen pernyataan kinerja antara Wali Kota Bogor dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor untuk mewujudkan target kinerja melalui pelaksanaan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian baik berupa hasil ataupun manfaat.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Wali Kota dan Kepala Dinas atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas dan fungsi serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berjalan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

## C. MATRIKS PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep <i>Good</i>	1. Nilai Indeks Evaluasi SPBE;	2,92	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>  Pendataan, Verifikasi dan Serah Terima Hak Akses Seluruh Aplikasi dan Data Base serta Evaluasi SPBE	-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
	<i>Governance</i>			Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor	41,730,000,00
				Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Sistem Elektronik	3.650.000,00
				Pengadaan Infrastruktur ruang kendali jaringan dan server	150.000.000,00
				Pemeliharaan dan Pengelolaan Infrastruktur ruang kendali jaringan dan server	111.117.000,00
				Pengelolaan Data Recovery Center (DRC)	156.937.000,00
				Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota	793.200.000,00
				Pembangunan Wifi Ruang Publik	-
				Pemeliharaan Jaringan intranet dan internet (backbone) Kota Bogor	685.710.000,00
				Pemeliharaan Wifi Ruang Publik	-
				Pemeliharaan Grounding listrik dan erester	-
				Pengelolaan Bandwith	2.477.710.000,00
				Pengadaan CCTV Kota Bogor	-
				Pemeliharaan CCTV Kota Bogor	40.618.200,00
				Pemeliharaan Teleconference Kota Bogor	74.968.000,00
				Pengembangan dan pengelolaan Bogor Green Room (Command Center), Server Data dan Aplikasi	1.487.100.000,00



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
				Digitalisasi Profil dan Pengembangan/promosi ekosistem e-government dan smart city	-
				Pengembangan datawarehouse dan sistem informasi kota (SIMATA)	-
				Sosialisasi/Diseminasi Standarisasi Aplikasi	17.075.000,00
				Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi	729.840.000,00
				Layanan Kemitraan dan Pengelolaan Media Dalam Penyebaran Informasi	97,417,600,00
				Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik Berbasis Multimedia	112.680.000,00
				<b>Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</b>	
				Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Informasidan Persandian	89,065,000,00
				Audit Sistem Informasidan Evaluasi Status Aplikasi di Tingkat Perangkat Daerah	-
		2. Peningkatan layanan pengaduan masyarakat;	85	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	
				Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat	688.460.000,00
				<b>Program Pengembangan Data dan Informasi</b>	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
				Peningkatan Kualitas Pelayanan PPID	-
				Penguatan Hubungan Kelembagaan Masyarakat	2.560.000,00
2.	Tersedianyadata statistiksektoral	Jumlah penyajian statistik sektoral	2	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	
				Pengelolaan statistik sektoral	127.607.00,00
				Satu Data Statistik sektoral	68.179.000,00
				Penyajian Statistik Sektoral	77.743.000,00
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas	1. Nilai Akuntabilitas kinerja Dinas 2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	B  90%	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	
				Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	3.200.000,00
				<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	
				Pengelolaan Rumah Tangga OPD	743,412,740,00
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	
				Pengadaan Inventaris Kantor	96,417,000,00
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor	-

Sumber : Diskominfo Tahun 2020

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor yang merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang telah ditetapkan.

#### **A. CAPAIAN KINERJA**

Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian sasaran menurut indikator yang telah ditetapkan kami uraikan sebagai berikut:

##### **MISI 2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas.**

**Tujuan 1.** : Peningkatan kualitas smart government

**Sasaran 1.1** : Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep Good Governance

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
Nilai Indeks Evaluasi SPBE	2.92	2.97	101,7%

Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE ditujukan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan meningkatkan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

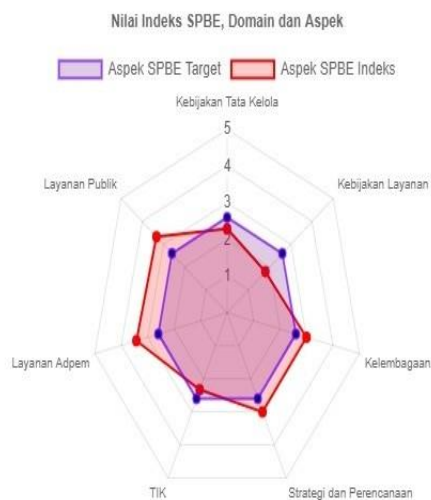
Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan

dokumen pendukung.

## Penjelasan hasil Penilaian Indeks SPBE

Hasil Penilaian Indeks SPBE Kota Bogor dengan nilai rata-rata seluruh dimensi adalah **2,97 (dua koma sembilan tujuh)** dan termasuk dalam **kategori BAIK**.

### NILAI INDEKS SPBE, DOMAIN DAN ASPEK



Nama Instansi

**Pemerintah Kota Bogor**

K/L/D : Kota  
Daerah : Jawa Barat  
**Indeks SPBE : 2.97**  
Predikat SPBE : Baik

**Domain Kebijakan SPBE : 2.00**

➤ Kebijakan Tata Kelola SPBE : 2.29  
➤ Kebijakan Layanan SPBE : 1.8

**Domain Tata Kelola : 2.71**

➤ Kelembagaan : 3.00  
➤ Strategi dan Perencanaan : 3.00  
➤ TIK : 2.33

**Domain Layanan SPBE : 3.39**

➤ Administrasi Pemerintahan : 3.43  
➤ Pelayanan Publik : 3.33

Penetapan SPBE dinilai dengan metode Tingkat Kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE 5 (lima) level dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yaitu:

1. Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses:
  - 1) Rintisan;
  - 2) Terkelola;
  - 3) Terstandardisasi;
  - 4) Terintegrasi dan terukur;
  - 5) Optimum.
2. Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis:
  - 1) Informasi;

- 2) Interaksi
- 3) Transaksi
- 4) Kolaborasi;
- 5) Optimalisasi.

Selain penilaian dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis juga dilihat dari 3 (tiga) domain dan 7 (tujuh) Aspek yaitu:

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE		
<b>Domain 1 - Kebijakan SPBE</b>	<b>17%</b>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
Aspek 1 - Kebijakan Tata Kelola SPBE	7%			
Aspek 2 - Kebijakan Layanan SPBE	10%	1	4,2 – 5,0	Memuaskan
<b>Domain 2 - Tata Kelola SPBE</b>	<b>28%</b>	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
Aspek 3 - Kelembagaan	8%	3	2,6 – < 3,5	Baik *)
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	8%	4	1,8 – < 2,6	Cukup
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	12%	5	< 1,8	Kurang
<b>Domain 3 - Layanan SPBE</b>	<b>55%</b>	*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)		
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	33%			
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	22%			

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	1,98	2,97	2,73	2,06	2,27	1,77	2,17
Domain Kebijakan	1,75	2,68	2,36	1,76	2,05	1,53	1,90
Kebijakan Tata Kelola	1,64	2,45	2,20	1,78	1,97	1,43	1,81
Kebijakan Layanan	1,82	2,84	2,47	1,74	2,10	1,61	1,94
Domain Tata Kelola	1,74	2,71	2,67	2,08	2,08	1,50	1,90
Kelembagaan	1,61	2,51	2,37	1,91	1,85	1,39	1,79
Strategi & Perencanaan	1,80	2,63	2,63	2,07	2,22	1,56	1,98
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,79	2,88	2,89	2,21	2,13	1,53	1,90
Domain Layanan SPBE	2,17	3,20	2,87	2,14	2,44	1,98	2,39
Administrasi Pemerintahan	2,33	3,31	2,95	2,61	2,63	2,15	2,52
Layanan Publik	1,90	3,00	2,73	1,92	2,12	1,66	2,13

**Tujuan 1.** : Peningkatan kualitas *smart government*

**Sasaran 1.1** : Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep Good Governance

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan layanan pengaduan masyarakat	85	78	92%

Layanan pengaduan masyarakat adalah aplikasi aspirasi online sebagai sarana untuk masyarakat Kota Bogor menyampaikan atau melayangkan aspirasi, saran, kritik, pengaduan, pertanyaan dan ketidakpuasan masyarakat atas layanan yang diberikan Pemerintah Kota Bogor kepada masyarakat.

Jenis layanan pengaduan masyarakat yang disampaikan bersifat umum, misalnya jalan rusak, PKL, hiburan malam, gedung sekolah rusak, permintaan data dan lain-lain.

Dari target 85% (delapan puluh lima persen) pengaduan masyarakat tidak seluruhnya tercapai realisasi targetnya atau hanya 78% (tujuh puluh delapan persen) dikarenakan proses pertukaran data pada server mengalami kendala mati listrik, sehingga adanya data yang tidak update mengakibatkan pengaduan masyarakat tidak/terlambat ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah.

**Tujuan 1.** : Peningkatan kualitas *smart government*

**Sasaran 2.1** : Tersedianya data statistik sektoral

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah penyajian statistik sektoral	2	1	50%

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor telah melaksanakan Survei Indeks Ketahanan Keluarga Kota Bogor. Survei ini dilatar belakangi oleh isu pembangunan nasional yang menekankan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Kota Bogor merupakan salah satu kota yang memiliki Visi sebagai Kota yang Ramah Keluarga.

Hasil dari survei ini diketahui bahwa nilai Indeks Ketahanan Keluarga Kota Bogor tahun 2020 adalah sebesar 85,2 berdasarkan kategori BPS nilai tersebut termasuk dalam kategori sangat tinggi ( $\geq 75$ ). Nilai Indeks Ketahanan Kota Bogor dapat dijadikan sebagai landasan dalam kebijakan pembangunan keluarga Kota Bogor.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor juga telah melakukan kompilasi data statistik sektoral yang terdiri dari 4557



elemen data KOR Kemendagri, Data RKPD Perangkat Daerah 2021, dan e-database Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Dari rencana penyajian statistik sektoral dari target berupa 2 (dua) buku hanya dapat dilaksanakan/terrealisasi hanya 1 (satu) buku. Hal ini dikarenakan untuk penyajian buku tersebut memerlukan anggaran biaya sedangkan anggaran kegiatan tersebut terkena refocussing untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

**Tujuan 2.** : Peningkatan Manajemen Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional

**Sasaran 3.1** : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Akuntabilitas kinerja Dinas	B	BB	
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	90%	90%	100%

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor diperoleh berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja.

Untuk setiap hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan ditindaklanjuti sesuai arahan dalam rekomendasi evaluasi kinerja.

### **Capaian Akuntabilitas Kinerja Pada Tahun Sebelumnya**

Pada tahun 2019 yang pengukuran Akuntabilitas kinerjanya mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019 RPJMD Tahun 2014-2019, terdapat 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran menurut indikator yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

**MISI 1. Mewujudkan lingkungan masyarakat Kota Bogor yang cerdas dan dinamis dalam persaingan lokal dan global dengan wawasan TIK.**

**Tujuan 1.1.** : Peningkatan kualitas *smart government*

**Sasaran 1.1.1** : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang cerdas (*smart governance*)

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
indeks e-government	3,21	3,10	96,6%

**Sasaran 1.1.2** : Meningkatnya kualitas infrastruktur TIK

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Penyediaan infrastruktur Jaringan Internet dan intranet menggunakan Fiber Optik	80%	66%	82,5%

**Sasaran 1.1.3** : Meningkatnya integrasi data sistem informasi

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Integrasi Data SIM	20,39%	20,59%	101%

**MISI 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Governance* dalam meningkatkan mutu pelayanan publik.**

**Tujuan 2.1.** : Pengembangan dan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik

**Sasaran 2.1.1** : Meningkatnya pelayanan informasi dan komunikasi

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase layanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah terkait	70%	80,14%	114%



**Tujuan 2.2.** : Peningkatan Manajemen Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional

**Sasaran 2.2.1** : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Akuntabilitas kinerja Dinas	B	BB	
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam struktur keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Lebih lanjut pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2020 yang telah ditetapkan, dapat terwujud dengan adanya dukungan dan sebagaimana tertuang dalam APBD, baik yang dialokasikan pada Anggaran Belanja Langsung maupun Anggaran Belanja Tidak Langsung.

Secara keseluruhan target belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2020 setelah Anggaran Perubahan sebesar Rp23.193.568.684,00 (dua puluh tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terealisasi Rp21.682.323.729,00 (dua puluh satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) atau dengan persentase sebesar 93,48% (sembilan puluh tiga koma empat puluh delapan persen) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Target **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp8.372.880.219,00 (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah) terealisasi Rp7.304.347.077,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) atau dengan

persentase sebesar 87,24% (delapan puluh tujuh koma dua puluh empat persen)

- b. Target **Belanja Langsung** sebesar Rp14.820.688.465,00 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) terealisasi Rp14.377.976.652,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) atau 97,01% (sembilan puluh tujuh koma nol satu persen).

Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Belanja Tidak Langsung	8.372.880.219,00	7.304.347.077,00	87,24%
Belanja Langsung	14.820.688.465,00	14.377.976.652,00	97,01%
<b>Jumlah</b>	<b>23.193.568.684,00</b>	<b>21.682.323.729,00</b>	93,48%

#### Capaian Akuntabilitas Keuangan Pada Tahun Sebelumnya

Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Belanja Tidak Langsung	8.520.586.704,00	7.952.944.046,00	93,34%
Belanja Langsung	9.870.239.589,00	9.740.224.759,00	98,68%
<b>Jumlah</b>	<b>18.390.826.293,00</b>	<b>17.963.168.805,00</b>	96,21%

Secara keseluruhan target belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2019 sebesar Rp **18.390.826.293,00** (delapan belas milyar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terealisasi sebesar Rp **17.963.168.805,00** (tujuh belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah) atau dengan persentase sebesar 96,21% (sembilan puluh enam koma dua puluh satu persen) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Target **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp 8.520.586.704,00 (delapan milyar lima ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah) terealisasi Rp 7.952.944.046,00 (tujuh milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu empat puluh enam rupiah)

atau dengan persentase sebesar 93,34% (sembilan puluh tiga koma tiga puluh empat persen)

- b. Target **Belanja Langsung** sebesar Rp 9.870.239.589,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) terealisasi Rp 9.740.224.759,00 (sembilan juta tujuh ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) atau 98,68% (sembilan puluh delapan koma enam puluh delapan persen).

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor merupakan dokumen yang menggambarkan pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor selama tahun 2020 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja tahun 2020.

Dari 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai dengan target indikator yang telah ditetapkan semuanya telah diukur dan dievaluasi capaiannya seperti yang telah dijabarkan dalam laporan ini. Pencapaian itu dihasilkan melalui perhitungan antara persentase nilai capaian dengan indikator kinerja sasaran.

Sasaran yang telah dicapai dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan operasional untuk mencapai tujuan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian dengan meliputi layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta layanan pengaduan dan aspirasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai langkah awal menuju Bogor sebagai Smart City.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2020 yang dapat kami sampaikan. Semoga laporan ini bisa menjadi evaluasi bersama atas pencapaian sasaran kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2019-2024 sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja tahun 2020 dan dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih baik di tahun anggaran selanjutnya untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.